

## ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*

Alvin Agus Elyanto, Muchamad Syafruddin<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This study aimed to examine the effect of audit committee characteristics such as the size of the audit committee, the composition of non-executive directors in audit committee, the number of audit committee meetings, and the number of financial literacy in the audit committee of the occurrence of financial distress. The population in this study is an entire company (non-banking) listed in the Indonesia Stock Exchange in 2010 and 2011. Samples were taken by purposive sampling. The criteria of financial distress company is a company with a negative net income in the financial reporting period. Total sample used is 84 companies consist of 42 financial distress companies and 42 non-financial distress companies with the similarity in the industry and accounting reporting period. This study uses logistic regression as statistical tools. The result showed that variable the number of audit committee meetings and the number of financial literacy on the audit committee have a negative and significant relationship with the probability of financial distress, while variable the size of the audit committee and the composition of non-executive directors in audit committee have negative but not significant relationship with the probability of financial distress.*

*Keyword: Corporate Governance, audit committee characteristics, financial distress, negative net income.*

### PENDAHULUAN

Salah satu elemen kunci dari struktur *corporate governance* yang diterapkan pada suatu perusahaan adalah keberadaan komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk mengendalikan dan memonitor manajemen. Komite audit berperan penting dalam mengendalikan dan memonitor operasi serta sistem pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Komite audit yang efektif diharapkan dapat fokus untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi dari manajemen puncak (Wathne dan Heide, 2000).

Pembentukan komite audit di Indonesia mulai diatur setelah terjadinya krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Awalnya, pembentukan komite audit masih bersifat sukarela, kemudian Bapepam LK mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX. 1.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit” yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004. Peraturan tersebut mewajibkan agar perusahaan yang *listing* pada Bursa Efek Indonesia agar membentuk komite audit.

DeZoort *et al.* (2002) menyatakan bahwa komite audit yang efektif memiliki anggota yang berkualitas serta memiliki wewenang dan sumber daya untuk melindungi kepentingan para *stakeholder* dengan memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengendalian internal, dan manajemen resiko melalui usaha pengawasan yang tekun. Agar dapat melaksanakan fungsi dan

<sup>1</sup> *Corresponding author*

tanggung jawabnya dengan efektif, komite audit harus memiliki karakteristik yang baik. Karakteristik komite audit meliputi ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit.

Rendahnya efektivitas yang dimiliki oleh komite audit berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. Penurunan kinerja perusahaan dapat membuat kondisi keuangan perusahaan memburuk dan mengakibatkan perusahaan mengalami *financial distress*. Menurut Peraturan Pencatatan Saham Shanghai *Stock Exchange* (SHSE) dan Shenzen *Stock Exchange* (SZSE) pada tahun 2001, kesulitan keuangan merupakan situasi keuangan yang tidak normal yang terjadi pada sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut menghadapi situasi-situasi tertentu, salah satunya adalah laba bersih selama dua tahun terakhir negatif.

Menurut Lizal (2002), salah satu penyebab kesulitan keuangan adalah *Corporate Governance Model*. Model ini menjelaskan bahwa kesulitan keuangan dapat terjadi karena adanya masalah dalam tata kelola perusahaan. Salah satu elemen dari tata kelola perusahaan adalah keberadaan komite audit. Oleh karena itu, kesulitan keuangan dapat terjadi apabila komite audit tidak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan efektif.

Sebagai bagian dari strategi kepemimpinan perusahaan, efektivitas dari suatu komite audit dapat berpengaruh terhadap kesulitan keuangan yang sedang dialami perusahaan maupun sebaliknya. Selain itu, efektivitas dari komite audit turut berkontribusi dalam keberhasilan upaya perubahan arah perusahaan. Menurut McMullen dan Raghunandan (1996), komite audit yang kompeten dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan pada perusahaan. Sebaliknya, Simpson dan Gleason (1999) menyatakan bahwa kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh komite audit dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Komite audit yang kompeten dapat terus membantu meningkatkan performa perusahaan, karena kompetensi yang dimiliki oleh komite audit berhubungan negatif dengan kesulitan keuangan perusahaan (Rahmat *et al.*, 2009).

Penelitian terkait *financial distress* telah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian Simpson dan Gleason (1999) yang meneliti hubungan antara *financial distress* dengan dewan direksi. Selain itu, juga terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai karakteristik komite audit, yaitu membahas hubungannya dengan kualitas pelaporan (Abbott dan Parker, 2000), manajemen laba (Lin *et al.*, 2006), dan ketepatan waktu pelaporan (Nor *et al.*, 2010). Namun, masih sedikit penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat *et al.* (2009). Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan bukti tambahan mengenai kinerja komite audit dengan cara membandingkan pengaruh karakteristik komite audit pada perusahaan yang mengalami *financial distress* dan yang tidak mengalami *financial distress*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *financial*

*distress* dan perusahaan *non-financial distress* dengan memakai data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Kriteria perusahaan *financial distress* yaitu perusahaan yang memiliki laba negatif selama satu periode pelaporan, karena perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak dapat menghasilkan laba (Rahmat *et al.*, 2009). Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ukuran komite audit, komposisi komisaris independen, jumlah pertemuan, dan ahli keuangan dalam komite audit terhadap terjadinya *financial distress* dan memberikan bukti tambahan mengenai kinerja komite audit dengan cara membandingkan karakteristik yang dimiliki oleh komite audit pada perusahaan *financial distress* dan perusahaan *non-financial distress*.

### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

*Agency Theory* menjelaskan hubungan yang dimiliki antara *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan biasanya terjadi antara pemilik dan pemegang saham perusahaan sebagai *principal* sedangkan pihak manajemen sebagai *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan hubungan kontrak antara *principal* yang mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Pendelegasian wewenang tersebut membuat pemilik tidak dapat mengawasi semua kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Tindakan manajemen tersebut mungkin berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pemilik. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau memang terdapat unsur kecurangan yang ingin dilakukan oleh manajer. Hal tersebut dinamakan *moral hazard*.

Konflik antara manajer dan pemegang saham sering membuat manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik dari pemegang saham, khususnya bila orang yang sangat oportunis terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Tanpa prosedur pengawasan yang efektif dan independen, manajemen puncak perusahaan selalu tergoda untuk menyimpang dari tugasnya, yaitu melindungi kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983). Komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut sehingga dapat menjaga kinerja perusahaan agar berjalan dengan baik (Ainudin dan Abdullah, 2001). Oleh karena itu, komite audit yang memiliki karakteristik yang baik diharapkan dapat menjaga kinerja perusahaan dengan baik sehingga membuat kondisi keuangan perusahaan tetap terkendali dan dapat menghindarkan perusahaan dari terjadinya *financial distress*.

## Hipotesis

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Distress***

Untuk membuat komite audit yang efektif dalam menjalankan tugasnya dalam memonitor dan mengendalikan aktivitas dewan direksi, komite audit harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut (Rahmat *et al.*, 2009). Dalton *et al.* (1999) menyatakan bahwa komite audit menjadi tidak efektif ketika ukuran komite audit terlalu kecil atau terlalu besar. Jumlah anggota komite audit yang terlalu banyak dianggap dapat kehilangan fokus dan kurang berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan jumlah anggota komite audit yang terlalu sedikit dianggap memiliki kekurangan dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Komite audit dengan jumlah anggota yang tepat dapat membuat anggota komite audit menggunakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Rahmat *et al.*, 2009).

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,” komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten, hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki minimal tiga orang anggota dianggap sudah mampu untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Komite audit yang ideal biasanya terdiri dari tiga sampai lima orang anggota (FCGI, 2002).

Hubungan positif antara ukuran komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan didukung oleh teori ketergantungan sumber daya (Pearce dan Zahra, 1992). Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, dengan semakin meningkatnya jumlah anggota membuat komite audit memiliki lebih banyak sumber daya khususnya untuk menghadapi masalah yang sedang dialami perusahaan. Oleh karena itu, efektifitas komite audit akan meningkat ketika ukuran komite juga meningkat sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari *financial distress*. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

### **Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Audit terhadap *Financial Distress***

Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa perusahaan *listed* di BEJ harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,” komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang (1) berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan (4) tidak

memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yang berasal dari luar perusahaan dan seorang komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Tingginya komposisi komisaris independen dalam komite audit dapat meningkatkan independensi dari komite itu sendiri (Rahmat *et al.*, 2009). Independensi yang dimiliki komisaris independen menunjukkan bahwa komite audit mampu memberikan rekomendasi yang independen kepada dewan komisaris. Rekomendasi yang diberikan komite audit turut berkontribusi dalam menghasilkan rencana strategis untuk meningkatkan performa perusahaan sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Komposisi komisaris independen dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

#### **Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap *Financial Distress***

Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal membuat komite audit perlu untuk mengadakan pertemuan secara rutin (Vafeas, 1999). Pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh komite audit akan membantu komite audit dalam memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan sistem pengendalian internal perusahaan (McMullen dan Raghunandan, 1996).

Komite audit yang memiliki frekuensi pertemuan yang tinggi mampu menghasilkan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang lebih efektif khususnya pada aktivitas keuangan perusahaan. Peran pengawasan dan pemantauan komite audit pada aktivitas keuangan perusahaan meliputi proses persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa komite audit pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki frekuensi pertemuan yang lebih sedikit daripada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (McMullen dan Raghunandan, 1996). Oleh karena itu, jumlah pertemuan komite audit yang tinggi memiliki hubungan yang positif dengan efektivitas komite audit sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

#### **Pengaruh Jumlah Ahli Keuangan dalam Komite Audit terhadap *Financial Distress***

Latar belakang pendidikan menjadi salah satu karakteristik yang penting untuk memastikan bahwa komite audit melaksanakan tugas mereka secara efektif. Pengetahuan tentang akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan

menganalisis informasi keuangan (Rahmat *et al.*, 2009). Komite audit yang memiliki anggota dengan latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan akan memiliki standar yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan akan selalu berusaha untuk menghasilkan kinerja dan *image* yang baik bagi perusahaan (Rahmat *et al.*, 2009)

FCGI (2002) berpendapat bahwa komite audit minimal harus memiliki satu orang anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keuangan dan akuntansi. Keberadaan ahli keuangan dalam komite audit dapat membantu komite audit dalam melaksanakan peran pengendalian dan pemantauan yang dimilikinya secara efektif, sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari *financial distress*. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Jumlah ahli keuangan dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, penentuan sampel digunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Perusahaan perbankan tidak dimasukkan ke dalam sampel penelitian karena terdapat perbedaan pelaporan keuangan antara perusahaan perbankan dan non-perbankan.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) pada tahun 2010-2011. Pada saat penelitian dilakukan, laporan tahunan terbaru yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan *listed* di BEI adalah laporan tahunan tahun 2010 dan 2011. Selain itu, perusahaan yang menjadi sampel juga harus memaparkan keberadaan komite audit secara lengkap dalam laporan tahunan yang dipublikasikan.

Selanjutnya sampel diambil secara berpasangan antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan dengan ketentuan memiliki kesamaan dalam tahun pelaporan, bidang industri, dan besarnya aset.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Logistic Regression* (regresi logistik) untuk menguji hipotesis. Variabel bebas yang merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi sehingga membentuk fungsinya menjadi logistik. Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2006).

Regresi logistik digunakan karena variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini merupakan variabel *dummy*, yaitu perusahaan *financial distress* dan perusahaan *non-financial*

*distress*. sedangkan variabel independen yang digunakan adalah ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit. Ukuran perusahaan dan kualitas audit dimasukkan dalam model regresi ini sebagai variabel kontrol.

**Tabel 1 Definisi Operasionalisasi Variabel**

VARIABEL DEPENDEN	
<b>FINDISTRESS</b>	1= perusahaan <i>financial distress</i> , yaitu memiliki laba bersih negatif dalam satu tahun, 0= perusahaan <i>non-financial distress</i> , yaitu memiliki ROA positif.
VARIABEL INDEPENDEN	
<b>ACSIZE</b>	Jumlah anggota komite audit di perusahaan.
<b>ACCOMP</b>	Persentase komposisi komisaris independen di dalam komite audit.
<b>ACMEET</b>	Jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan secara rutin oleh seluruh anggota komite audit.
<b>ACLTERACY</b>	Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan mengenai akuntansi atau keuangan
VARIABEL KONTROL	
<b>SIZE</b>	Logaritma natural jumlah total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir tahun.
<b>AUDIT</b>	1= perusahaan diaudit oleh auditor Big4, 0= perusahaan diaudit oleh auditor non Big4

Model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FINDISTRESS_i = \alpha + \beta_0 ACSIZE_i + \beta_1 ACCOMP_i + \beta_2 ACMEET_i + \beta_3 ACLTERACY_i + \beta_4 SIZE_i + \beta_5 AUDIT_i + \varepsilon_i$$

Dengan :

FINDISTRESS	=	Variabel <i>dummy</i> untuk <i>financial distress</i> , yaitu: perusahaan <i>non-financial distress</i> bernilai 0 (nol), dan perusahaan <i>financial distress</i> bernilai 1 (satu)
$\alpha$	=	Konstanta
ACSIZE	=	Ukuran komite audit
ACCOMP	=	Komposisi komisaris independen dalam komite audit
ACMEET	=	Jumlah pertemuan komite audit
ACLTERACY	=	Jumlah ahli keuangan dalam komite audit
SIZE	=	Ukuran perusahaan
AUDIT	=	Variabel <i>dummy</i> untuk kualitas audit, yaitu: perusahaan diaudit oleh auditor <i>non-Big4</i> bernilai 0, dan perusahaan diaudit oleh auditor <i>Big-4</i> bernilai 1.
$\varepsilon$	=	<i>error</i>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Sampel penelitian dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: perusahaan *financial distress* yang memiliki laba bersih negatif dalam satu tahun dengan pasangannya perusahaan *non-financial distress* yang memiliki kinerja yang baik dilihat dari rasio *return on asset* (ROA) yang bernilai positif pada tahun yang sama, dan perusahaan yang menyajikan informasi tentang komite audit dengan lengkap. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari penelitian.

Setelah dilakukan proses pengumpulan data, diperoleh data bahwa selama tahun 2010 terdapat 17 perusahaan *financial distress* dan terdapat 25 perusahaan *financial distress* pada tahun 2011. Selanjutnya perusahaan-perusahaan tersebut dipasangkan dengan perusahaan *non-financial distress* dengan jumlah yang sama. Proses pemasangan dilakukan antara perusahaan dalam industri yang sama dan periode pelaporan yang sama. Jumlah total sampel yang diperoleh sebesar 84 perusahaan.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi (*standard deviation*). Pada tabel 2 di bawah ini akan ditunjukkan statistik deskriptif untuk variabel independen dan variabel kontrol, yaitu ukuran komite audit (ACSIZE), komposisi komisaris independen (ACCOMP), jumlah pertemuan komite audit (ACMEET), jumlah ahli keuangan (ACLTERACY), ukuran perusahaan (SIZE), dan kualitas audit (AUDIT).

**Tabel 2 Statistik Deskriptif**

Variabel	Seluruh Perusahaan				Perusahaan <i>Financial Distress</i>				Perusahaan <i>Non-Financial Distress</i>			
	Min	Max	Mean	Std	Min	Max	Mean	Std	Min	Max	Mean	Std
ACSIZE	2.00	6.00	3.13	0.49	2.00	4.00	3.02	0.27	3.00	6.00	3.24	0.62
ACCOMP	0.25	0.67	0.36	0.08	0.33	0.67	0.36	0.08	0.25	0.67	0.35	0.08
ACMEET	2.00	41.00	7.64	6.51	2.00	41.00	7.31	6.55	2.00	36.00	7.98	6.52
ACLTERACY	1.00	4.00	2.31	0.74	1.00	3.00	2.10	0.76	1.00	4.00	2.52	0.67
SIZE	9.87	13.50	12.06	0.79	9.87	13.50	12.04	0.81	10.29	13.47	12.08	0.77
Valid N (listwise)	84				42				42			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Berdasarkan tabel 2, ukuran komite audit (ACSIZE) pada seluruh perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 2.00, nilai maksimum sebesar 6.00, nilai rata-rata sebesar 3.13, dan standar deviasi sebesar 0.49. Ukuran komite audit (ACSIZE) pada perusahaan *financial distress* memiliki nilai minimum sebesar 2.00, nilai maksimum sebesar 4.00, nilai rata-rata sebesar 3.02 dan standar

deviasi sebesar 0.27. Pada perusahaan *non-financial distress*, ukuran komite audit (ACSIZE) memiliki nilai minimum sebesar 3.00, nilai maksimum sebesar 6.00, nilai rata-rata sebesar 3.24 dan standar deviasi sebesar 0.62.

Komposisi komisaris independen dalam komite audit (ACCOMP) pada seluruh sampel perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0.25, nilai maksimum sebesar 0.67, nilai rata-rata sebesar 0.36, dan standar deviasi sebesar 0.08. Pada perusahaan *financial distress*, komposisi komisaris independen (ACCOMP) memiliki nilai minimum sebesar 0.33, nilai maksimum sebesar 0.67, nilai rata-rata sebesar 0.36, dan standar deviasi sebesar 0.08. Komposisi komisaris independen (ACCOMP) pada perusahaan *non-financial distress* memiliki nilai minimum sebesar 0.25, nilai maksimum sebesar 0.67, nilai rata-rata sebesar 0.35, dan standar deviasi sebesar 0.08.

Jumlah pertemuan komite audit (ACMEET) pada seluruh perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 2.00, nilai maksimum sebesar 41.00, nilai rata-rata sebesar 7.64, dan standar deviasi sebesar 6.51. Pada perusahaan *financial distress*, jumlah pertemuan komite audit (ACMEET) memiliki nilai minimum sebesar 2.00, nilai maksimum sebesar 41.00, nilai rata-rata sebesar 7.31, dan standar deviasi sebesar 6.55. Jumlah pertemuan komite audit (ACMEET) pada perusahaan *non-financial distress* memiliki nilai minimum sebesar 2.00, nilai maksimum sebesar 36.00, nilai rata-rata sebesar 7.98, dan standar deviasi sebesar 6.52.

Jumlah ahli keuangan dalam komite audit (ACLTERACY) pada seluruh perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 1.00, nilai maksimum sebesar 4.00, nilai rata-rata sebesar 2.31, dan standar deviasi sebesar 0.74. Pada perusahaan *financial distress*, jumlah ahli keuangan dalam komite audit (ACLTERACY) memiliki nilai minimum sebesar 1.00, nilai maksimum sebesar 3.00, nilai rata-rata sebesar 2.10, dan standar deviasi sebesar 0.76. Jumlah ahli keuangan dalam komite audit (ACLTERACY) pada perusahaan *non-financial distress* memiliki nilai minimum sebesar 1.00, nilai maksimum sebesar 4.00, nilai rata-rata sebesar 2.52, dan standar deviasi sebesar 0.67.

Nilai ukuran perusahaan (SIZE) pada seluruh perusahaan, memiliki nilai minimum sebesar 9.87, nilai maksimum sebesar 13.50, nilai rata-rata sebesar 12.06, dan standar deviasi sebesar 0.79. Pada perusahaan *financial distress*, nilai ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 9.87, nilai maksimum sebesar 13.50, nilai rata-rata sebesar 12.04, dan standar deviasi sebesar 0.81. Nilai ukuran perusahaan (SIZE) pada perusahaan *non-financial distress* memiliki nilai minimum sebesar 10.29, nilai maksimum sebesar 13.47, nilai rata-rata sebesar 12.08, dan standar deviasi sebesar 0.77.

Kualitas audit (AUDIT) pada seluruh perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 1.00, nilai rata-rata sebesar 0.31, dan standar deviasi sebesar 0.47. Pada perusahaan *financial distress*, kualitas audit (AUDIT) memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 1.00, nilai rata-rata sebesar 0.21, dan standar deviasi sebesar 0.42. Kualitas

audit (AUDIT) pada perusahaan *non-financial distress* memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 1.00, nilai rata-rata sebesar 0.40, dan standar deviasi sebesar 0.50.

Hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan *financial distress* memiliki ukuran komite audit (ACSIZE), jumlah pertemuan komite audit (ACMEET), Jumlah ahli keuangan dalam komite audit (ACLTRCY), kualitas audit (AUDIT), dan ukuran perusahaan (SIZE) yang lebih rendah dibandingkan perusahaan *non-financial distress*.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan alat statistik regresi logistik, yaitu untuk menguji pengaruh ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit terhadap terjadinya *financial distress*. Pengujian signifikansi koefisien dari setiap variabel bebas menggunakan *p-value* (*probability value*) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan. Hasil pengujian hipotesis disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
ACSIZE	-1.648	0.968	2.896	1	0.089	0.192
ACCOMP	-12.31	8.062	2.331	1	0.127	0
ACMEET	-2.394	0.755	10.06	1	0.002	0.091
ACLTERACY	-1.441	0.466	9.571	1	0.002	0.237
SIZE	-21.728	7.006	9.618	1	0.002	0
AUDIT	-2.561	0.864	8.789	1	0.003	0.077
Constant	44.589	19.644	5.152	1	0.023	2.32E+19

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Hipotesis satu ( $H_1$ ) menyatakan bahwa ukuran komite audit (ACSIZE) berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil pengolahan data, **hipotesis satu ( $H_1$ ) ditolak**. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki nilai koefisien sebesar -1.648 dan signifikansi sebesar 0.089. Nilai signifikansi variabel ukuran komite audit lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*. Dengan demikian  $H_1$  yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dinyatakan ditolak.

Semakin banyak jumlah anggota yang dimiliki komite audit tidak menjamin bahwa komite audit mampu bekerja secara lebih efektif. Argumen ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dalton *et al.* (1999), yang menyatakan bahwa komite audit menjadi tidak efektif ketika ukuran komite audit terlalu kecil atau terlalu besar. Jumlah anggota komite audit yang terlalu banyak membuat komite audit dapat kehilangan fokus dan kurang berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya kontribusi serta fokus yang dimiliki oleh anggota komite audit dapat

menyebabkan komite audit bekerja secara tidak efektif sehingga dapat menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress*.

Hipotesis dua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa komposisi komisaris independen dalam komite audit (ACCOMP) berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil pengolahan data, **hipotesis dua ( $H_2$ ) ditolak**. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen dalam komite audit memiliki nilai koefisien sebesar -12.310 dan signifikansi sebesar 0.127. Nilai signifikansi variabel komposisi komisaris independen dalam komite audit lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa variabel komposisi komisaris independen dalam komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*. Dengan demikian,  $H_2$  yang menyatakan bahwa komposisi komisaris independen dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dinyatakan ditolak.

Hal ini dapat terjadi karena komposisi komisaris independen dalam komite audit tidak secara efektif menghindarkan perusahaan dari *financial distress*. Keberadaan komisaris independen dalam komite audit mungkin hanya untuk memenuhi regulasi saja. Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit” mengatur bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib memiliki komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dari luar emiten atau perusahaan publik. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang *listed* di BEI telah memenuhi kriteria tersebut, sehingga variabel komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress* pada suatu perusahaan.

Hipotesis tiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa jumlah pertemuan komite audit (ACMEET) berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, **hipotesis tiga ( $H_3$ ) diterima**. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa jumlah pertemuan komite audit memiliki nilai koefisien sebesar -2.394 dan signifikansi sebesar 0.002. Nilai signifikansi variabel jumlah pertemuan komite audit dibawah 0.05 yang berarti bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Dengan demikian,  $H_3$  yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dinyatakan diterima.

Pada *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2002) dijelaskan bahwa komite audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat minimal sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu tahun agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut sistem pelaporan keuangan perusahaan secara efektif. Oleh karena itu, semakin banyak pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat meningkatkan performa perusahaan sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari *financial distress*. Hasil penelitian ini juga mendukung penemuan McMullen dan Raghunandan (1996) yang menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan yang mengalami

kesulitan keuangan memiliki frekuensi pertemuan yang lebih sedikit daripada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Hipotesis empat ( $H_4$ ) menyatakan jumlah ahli keuangan dalam komite audit (ACLTERACY) berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil pengolahan data, **hipotesis empat ( $H_4$ ) diterima**. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa jumlah ahli keuangan dalam komite audit memiliki nilai koefisien sebesar -1.441 dan signifikansi sebesar 0.002. Nilai signifikansi variabel jumlah ahli keuangan dalam komite audit dibawah 0.05 yang berarti bahwa variabel jumlah ahli keuangan dalam komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Dengan demikian,  $H_4$  yang menyatakan bahwa jumlah ahli keuangan dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dinyatakan diterima.

Semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan maka akan semakin efektif dalam menghindarkan perusahaan dari *financial distress*. Sedikitnya jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan akan membuat perusahaan mengalami penurunan kinerja sehingga menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress*. Kurangnya anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan membuat komite audit tidak mampu melakukan pengawasan secara efektif sehingga menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rahmat *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa ahli keuangan dalam komite audit mampu meningkatkan efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) yang diuji menggunakan model regresi logistik. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai beta sebesar -21.728 dan signifikansi sebesar 0.002. Hasil tersebut berarti bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan karena signifikansinya kurang dari 0.05. Dengan demikian, variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *financial distress*.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol kualitas audit (AUDIT) yang diuji menggunakan model regresi logistik. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki nilai koefisien sebesar -2.561 dan signifikansi sebesar 0.003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan karena signifikansinya kurang dari 0.05. Dengan demikian, variabel kontrol kualitas uaidt berpengaruh negatif terhadap terjadinya *financial distress*.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa karakteristik komite audit yang terdiri dari ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam

komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan ahli keuangan dalam komite audit berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress*. Sampel yang digunakan sebanyak 84 perusahaan yang terdiri dari 42 perusahaan *financial distress* dan 42 perusahaan *non-financial distress* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis diterima kecuali hipotesis dua, dan model regresi logistik dalam penelitian ini layak berdasarkan pengujian overall fit model dan uji *Nagelkerke R Square*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 ditolak, sedangkan hipotesis 3 dan 4 diterima.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan antara lain, sebagai berikut: (i) periode penelitian yang relatif pendek, yaitu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2010 dan 2011, (ii) hanya menggunakan 4 karakteristik komite audit, yaitu: ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan ahli keuangan dalam komite audit, dan (iii) beberapa perusahaan tidak menyajikan beberapa informasi mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian secara lengkap sehingga mengurangi jumlah sampel.

Oleh karena itu, penulis memberikan saran bagi perusahaan untuk memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh komite audit, khususnya jumlah pertemuan dan ahli keuangan dalam komite audit agar perusahaan dapat terhindar dari kesulitan keuangan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah periode tahun yang dijadikan periode penelitian dan menambahkan kriteria lain untuk menentukan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan dapat menambahkan variabel independen lain sebagai proksi dari karakteristik komite audit.

## REFERENSI

- Abbott, L. J., & Parker, S. (2000). Auditor selection and audit committee characteristics. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 19 No. 2, pp. 47-66.
- Ainuddin, R. A., & Abdullah, N. (2001). Board characteristics and corporate governance of public listed companies in Malaysia. working paper, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- Dalton, D. R., Daily, C. M., Johnson, J. L., & Ellstrand, A. E. (1999). Number of directors and financial performance: a meta-analysis. *Academy of Management Journal*, Vol. 42, pp. 674-686.
- DeZoort, T., Hermanson, D., Archambeault, D. dan Reed, S. (2002). Audit committee effectiveness: a synthesis of the empirical audit committee literature. *Journal of Accounting Literature*, Vol. 21, pp. 38-75.
- Fachrudin, K. A. (2008). *Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Personal*. Medan: USU Press.

- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law & Economics* , Vol. 26, pp. 301-25.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2002). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta: Forum Corporate Governance.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics* , Vol. 3, pp. 305-360.
- Lin, J. W., Li, J. F., & Yang, J. S. (2006). The effect of audit committee performance on earnings quality. *Managerial Auditing Journal* , Vol. 21 No. 9, 2006.
- Lizal, L. (2002). Determinants of Financial Distress: What Drives Bankruptcy in a Transition Economy? *William Davidson Working Paper Number 451* .
- McMullen, D. A., & Raghunandan, K. (1996). Enhancing audit committee effectiveness. *Journal of Accountancy* , Vol. 182 No. 2, pp. 79-81.
- Mohamad Naimi Mohammad-Nor, R. S.-H. (2010). Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia. *AAMJAF* , Vol. 6, No. 2, pp. 57–84.
- Pearce, J. A., & Zahra, S. A. (1992). Board composition from a strategic contingency perspective. *Journal of Management Studies* , Vol. 29, pp. 411-438.
- Rahmat, M. M., Iskandar, T. M., & Saleh, N. M. (2009). Audit committee characteristics in financially distressed and non-distressed companies. *Managerial Auditing Journal* , Vol. 24 No. 7.
- Simpson, W. G., & Gleason, A. E. (1999). Board structure, ownership and financial distress in banking firms. *International Review of Economics and Finance* , Vol. 8 No. 3, pp. 281-92.
- Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal of Financial Economics* , Vol. 53 No.1 , pp. 113-142.
- Wathne, K. H., & Heide, J. B. (2000). Opportunism in inter-firm relationship: forms, outcomes and solutions. *Journal of Marketing* , Vol. 64 No. 4, pp. 36-51.